

STRATEGI PENGARUSUTAMAAN GENDE SEBAGAI UPAYA UNTUK MENCAPAI TUJUAN PEMBANGUNAN MILLENIUM DI KABUPATEN BANJARNEGARA

Endang Swastuti

Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Jl. Pawiyatan Luhur Bendan Dhuwur Semarang. Telp (024) 8316187; Fax (024) 8316193

Abstrak

Dari hasil analisis Strategi Pengarusutamaan Gender Sebagai Upaya Untuk Mencapai Tujuan Pembangunan Millenium Di Kabupaten Banjarnegara diperoleh hasil bahwa di Kabupaten Banjarnegara masih terjadi ketimpangan gender, karena masih terjadi selisih antara capaian nilai Indek Pembangunan Manusia IPM dan IPG pada tahun 2009 = 10,74. Padahal salah satu tujuan pembangunan millenium adalah mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Untuk mencapai tujuan tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara melakukan peningkatan akses perempuan dalam berbagai pengelolaan sumber daya pembangunan; manfaat kegiatan pembangunan bagi perempuan sebagai pemanfaat dan penerima hasil berbagai program pembangunan; kontrol perempuan terhadap pemanfaatan berbagai sumber daya dan fasilitas/prasarana yang tersedia; dan partisipasi perempuan dalam kegiatan pembangunan, khususnya dari segi tingkat keikutsertaan perempuan dan laki-laki dalam proses pengambilan keputusan. Strategi peningkatan akses, manfaat, kontrol serta partisipasi perempuan dalam pembangunan dituangkan dalam penyusunan perencanaan berperspektifkeadilan dan kesetaraan gender.

Kata kunci : Akses, Manfaat, Kontrol dan Partisipasi

Abstract

From the analysis of Gender Mainstreaming Strategy For Efforts To Achieve The Millennium Development Goals that the results obtained Festival Festival in gender inequality is still there, still there is difference between the achievements of the Human Development Index, HDI and GDI in 2009 = 10.74. In fact one of the millennium development goal is to encourage gender equality and empowerment of women. To achieve these objectives Festival Local Government to increase women's access to a variety of resource management development; the benefits of development activities for women as a result of a variety of users and beneficiaries of development programs; control women on the utilization of various resources and facilities / infrastructure available, and the participation of women in development activities, particularly in terms of level of participation of women and men in decision-making process. Strategy to improve access, benefits, control and participation of women in development plans outlined in the preparation of justice and gender equality perspective.

Keywords: Access, Benefits, Control and Participation

Pendahuluan

Permasalahan ketimpangan gender merupakan permasalahan umum yang dirasakan diseluruh dunia. Masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender dalam pemanfaatan hasil-hasil pembangunan masih jauh dari harapan. Hal ini bisa dilihat dari berbagai ketimpangan yang terjadi dalam proses-proses pembangunan. Ketimpangan gender (*gender inequality*) merupakan kendala dalam pencapaian kedudukan perempuan sebagai mitra sejajar laki-laki dalam pembangunan. Ketimpangan gender menurut Kamla Basin (1990) terjadi hampir disemua bidang, antara lain bidang agama, kesehatan, pendidikan, ketenaga kerjaan, perekonomian, politik dan hukum hak asasi manusia (HAM) serta ilmu pengetahuan dan teknologi serta media massa.

Konferensi Tingkat Tinggi Ke V tentang Perempuan di Beijing (1995) mengesahkan komitmen bersama dalam bentuk program aksi (*action plan*) bagi pemberdayaan perempuan terutama di negara-negara sedang berkembang. Pemerintah Indonesia telah melakukan Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan, bahkan sejak tahun 1983 pada Pelita Tahap III sampai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 semakin mendapatkan perhatian. Demikian pula dengan komitmen Indonesia dalam mencapai *Millenium Development Goals* (MDGs), yang bertujuan : (1) memberantas kemiskinan dan kelaparan; (2) mewujudkan pendidikan dasar untuk semua; (3) mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; (4) menurunkan kematian anak; (5) meningkatkan kesehatan ibu; (6) memerangi penyebaran HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya; (7) memastikan kelestarian lingkungan hidup dan (8) membangun kemitraan global dalam pembangunan.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No.15 tahun 2010 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Nasional, maka dalam kebijakan pembangunan di tahun mendatang harus semakin berkurang. Oleh karena itu, dalam percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium (*Millenium Development Goals*) secara nasional pada tahun 2015 diharapkan jumlah penduduk miskin semakin berkurang sebesar 50% pada akhir perencanaan serta menghapus kelaparan dan gizi buruk. Hal ini merupakan tantangan, secara nasional agar komitmen tersebut dapat terwujud pada tahun 2015.

Permasalahan lain, yang perlu mendapatkan perhatian adalah ketertinggalan perempuan dari laki-laki terkait pendidikan, kesehatan, jumlah angkatan kerja perempuan yang bekerja di sektor publik dan sumbangan dalam ekonomi rumah tangga.

Indikator penting yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan dalam kesetaraan dan keadilan gender yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index (HDI)*, Indeks Pembangunan Gender (IPG) atau *Gender Related Development Index (GDI)* dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) atau *Gender Empowerment Measurement (GEM)*. IPM merupakan komposit dari angka harapan hidup, angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah dan pengeluaran riil per kapita. Sama dengan IPM, IPG juga merupakan komposit dari angka harapan hidup, angka melek huruf, dan angka rata-rata lama sekolah, dan persentase angkatan kerja namun terpilah berdasarkan jenis kelamin. Sementara untuk IDG kompositnya adalah persentase perempuan di parlemen, persentase perempuan dalam angkatan kerja, dan rata-rata upah perempuan disektor non pertanian.

Nilai 3 indikator inilah yang akan menunjukkan seberapa sejahtera masyarakat dan bagaimana perwujudan kesetaraan dan keadilan gender di kabupaten/kota. Besarnya nilai 3 indikator tersebut berkisar antara 40 terendah dan 80 terbesar.

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 mengamanatkan bahwa Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender merupakan urusan wajib pada setiap pemerintahan daerah. Sementara itu dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7

tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) menekankan kesetaraan gender sebagai isu di luar urusan wajib dan pilihan untuk seluruh program dan kegiatan.

Pada tahun 2009 di Kabupaten Banjarnegara keadilan dan kesetaraan gender belum terwujud. Kondisi ini ditunjukkan dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banjarnegara sebesar 69,63 dan Indeks Pembangunan Gender (IPG)-nya sebesar 58,89, serta Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebesar 51,04. Kesenjangan gender dapat diketahui dari selisih antara IPM dengan IPG, yaitu sebesar 10,74.

Memperhatikan permasalahan belum tercapainya kesetaraan dan keadilan gender di Kabupaten Banjarnegara, maka perlu disusun Strategi Pengarusutamaan Gender yang dapat dijadikan sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pembangunan millenium (MDG's)

Perumusan Masalah

Bagaimana strategi pengarusutamaan gender yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara guna mencapai Tujuan Pembangunan Millenium (MDG's) ?

Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari kajian ini adalah :

Tersusunnya strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan di Kabupaten Banjarnegara

Metodologi

Metode yang digunakan dalam penyusunan Strategi Pengarusutamaan Gender Sebagai Upaya Untuk Mencapai Tujuan Pembangunan Millenium Di Kabupaten Banjarnegara adalah : 1. Teknik Analisis Gender, yang merupakan metode untuk menggambarkan tentang aktivitas akses, manfaat, kontrol, dan partisipasi perempuan dalam pembangunan. Metode ini dilakukan untuk menggambarkan

- a. Akses perempuan dan laki-laki dalam berbagai pengelolaan sumber daya pembangunan baik sumber daya alam, ekonomi, politik dan sumber daya kelembagaan.
- b. Manfaat kegiatan pembangunan bagi perempuan dan laki-laki sebagai pemanfaat dan penerima hasil berbagai program pembangunan.
- c. Kontrol (kendali) perempuan dan laki-laki terhadap pemanfaatan berbagai sumber daya dan fasilitas/prasarana yang tersedia.
- d. Partisipasi perempuan dan laki-laki dalam kegiatan pembangunan, khususnya dari segi tingkat keikutsertaan perempuan dan laki-laki dalam proses pengambilan keputusan.

Kerangka Pemikiran

Gender adalah konsep yang mengacu pada sistem peran hubungan antara laki-laki dan perempuan, yang ditentukan tidak berdasarkan biologi, melainkan berdasarkan konteks politik, ekonomi, dan sosial budaya.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka perempuan mempunyai kesamaan dan persamaan peran dengan kaum laki-laki disemua bidang pembangunan. Namun demikian, sampai saat ini pembangunan yang dilakukan belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan dasar perempuan Indonesia. Kendala budaya yang menempatkan perempuan pada lapisan kedua, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat makin mempersempit kesempatan perempuan dalam mengembangkan kemampuannya di berbagai bidang pembangunan.

Dampak dari adanya berbagai ketimpangan tersebut adalah terjadinya :

1. Sub ordinasi (penguasaan), yaitu penguasaan laki-laki terhadap perempuan, yang meliputi penguasaan sumberdaya fisik maupun psikis.
2. Marginalisasi (peminggiran) kaum perempuan dalam pembangunan, yaitu anggapan bahwa peranan dan partisipasi kaum perempuan dalam pembangunan tidak penting
3. Citra baku (*Stereotipe*), yaitu anggapan bahwa perempuan hanya mampu melakukan pada bidang-bidang tertentu saja, sesuai dengan kebiasaan yang dilakukan sehari-hari, misalnya karena sifat lembut perempuan sehingga dicitrakan hanya pantas menangani pekerjaan yang butuh kesabaran dan ketelatenan.
4. Beban kerja ganda (*burden*). Dalam sistem sosial yang bersifat patriarkhi telah mengakibatkan beban kerja dan tanggungan sosial kaum perempuan lebih berat daripada laki-laki.
5. Kekerasan (*violence*), merupakan dampak buruk dari diskriminasi dan peminggiran, sehingga menyebabkan adanya kekerasan dalam rumah tangga, maupun kekerasan ditempat kerja, demikian juga kegiatan perempuan disektor publik rentan dari perlindungan hukum.

Semua gambaran ketidakadilan dari hasil-hasil pembangunan selama ini mengakibatkan terjadinya kesenjangan dan ketidakadilan di antara perempuan dan laki-laki dalam hal akses, kontrol, partisipasi dan manfaat dari hasil-hasil pembangunan. Kesenjangan gender tersebut dipengaruhi utamanya oleh nilai sosial budaya patriarkhi, produk dan peraturan perundang-undangan yang masih bias gender, pemahaman agama yang tidak komprehensif dan cenderung parsial, serta rendahnya kemauan dan tekad perempuan itu sendiri. Untuk mengeliminir ketimpangan tersebut, maka dalam melaksanakan pembangunan perlu dibuat strategi pembangunan yang responsif gender, yaitu strategi pembangunan yang dilakukan dengan memasukkan perbedaan-perbedaan pengalaman, aspirasi, dan permasalahan yang dihadapi perempuan dan laki-laki dalam perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan yang responsive gender merupakan konsep yang berupaya untuk meningkatkan aspirasi kepentingan dan peranan perempuan dan laki-laki serta martabat perempuan di segala bidang pembangunan. Dalam membuat perencanaan yang responsif gender, perlu dilakukan analisis gender pada semua kebijakan dan program pembangunan.

Untuk melakukan analisis gender perlu diperhatikan 4 (empat) faktor utama guna mengidentifikasi ada tidaknya kesenjangan gender, yaitu :

1. Faktor akses.

Pada tingkat akses kesenjangan gender muncul langsung dari ketidaksetaraan akses perempuan dan laki-laki terhadap sumberdaya, seperti lahan, kredit ke bank, tenaga, dan pelayanan. Perbaikan kesenjangan pada tingkat akses ini dapat dilakukan dengan penyadaran terhadap perempuan tentang perbedaan situasi perempuan dan situasi laki-laki, serta menganjurkan mereka untuk beraksi agar memperoleh akses atas bagian mereka terhadap sumberdaya yang tersedia.

2. Faktor kontrol.

Kesenjangan gender pada tingkat kontrol berupa relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara perempuan dan laki-laki, misalnya kontrol seorang suami terhadap tenaga dan penghasilan isteri. Hal ini berarti bahwa, suatu kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas perempuan/isteri mungkin tidak akan memberikan perbaikan yang berarti bagi perempuan/isteri, karena usahanya dipakai langsung oleh suaminya.

3. Faktor partisipasi.

Kesenjangan gender dalam hal partisipasi perempuan dan laki-laki pada seluruh tingkat merupakan fenomena yang mudah dilihat dan diukur, khususnya dari segi rendahnya tingkat keikutsertaan perempuan dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini berarti perempuan harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan secara proporsional menurut proporsi mereka di masyarakat/organisasi. Peningkatan perwakilan perempuan merupakan salah satu tujuan kunci dari strategi pemberdayaan pada tingkat partisipasi.

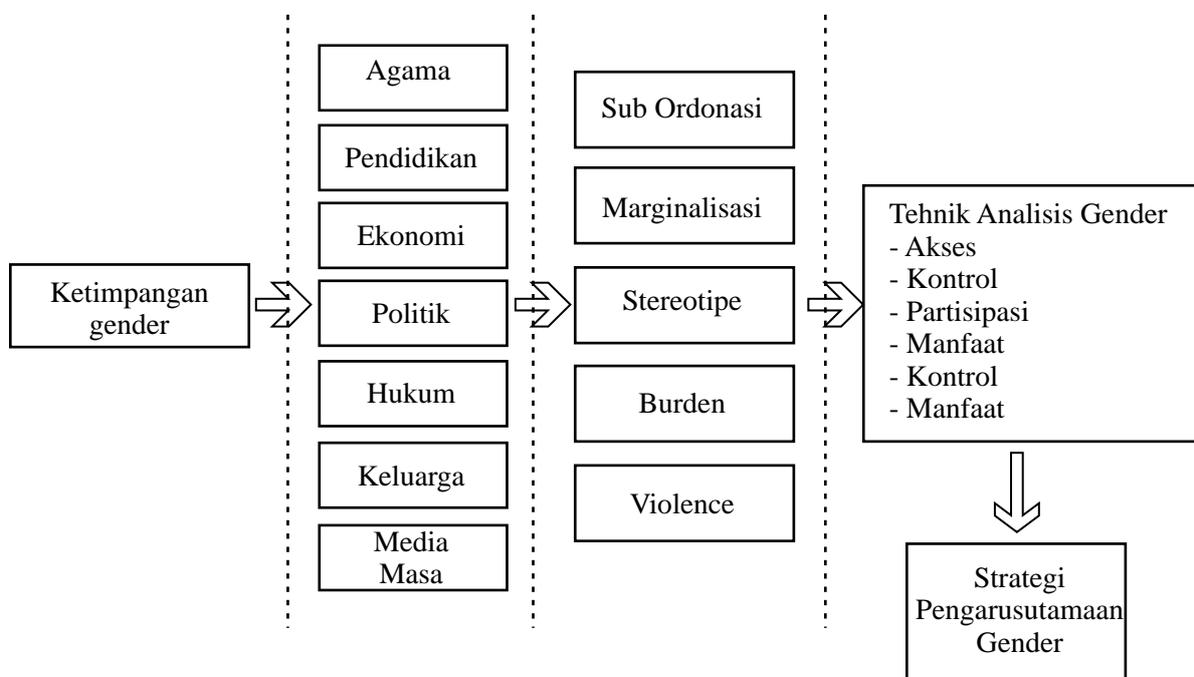
4. Faktor manfaat.

Pemberdayaan pada pemanfaatan hasil-hasil pembangunan berupa kesejahteraan. Tingkat kesejahteraan didefinisikan sebagai tindakan yang meningkatkan kesejahteraan materi perempuan, termasuk meningkatnya status gizi, persediaan makanan dan pendapatan mereka. Pada tingkat ini perempuan cenderung menjadi penerima pasif dari manfaat proyek dan program pembangunan.

Berdasarkan hasil dari analisis gender, dapat dilakukan analisis persoalan potensial atas kesenjangan gender yang ada, sehingga dapat dirumuskan strategi pengarusutamaan gender untuk mencapai Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs), yang salah satu tujuannya adalah mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Untuk memperjelas kerangka pikir tersebut, dapat dilihat dalam bagan berikut ini :

Gambar 1
Alur Pikir Strategi Pengarusutamaan Gender
Sebagai Upaya Untuk Mencapai *Millenium Development Goals*



Analisis

A. Gambaran Umum Kabupaten Banjarnegara

1. Keadaan Geografis

Wilayah Kabupaten Banjarnegara merupakan salah satu dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah dengan luas wilayah 106.970.997 Ha atau 3,29 % dari luas wilayah Propinsi Jawa Tengah. Wilayah Banjarnegara secara geografis terletak diantara 109° 29' -109° 45' 50' Bujur Timur dan 7°12' - 7° 31' lintang Selatan, dengan batas-batas wilayah Kabupaten Banjarnegara : sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Purbalinggadan Kab.Banyumas,sebelah Timur dengan Kabupaten Wonosobo, sebelah Utara dengan Kabupaten Pekalongan dan Kab. Batang, serta sebelah Selatan denganKabupaten Kebumen.

Secara administratif wilayah Kabupaten Banjarnegara terbagi dalam 20 kecamatan, 266 desa dan 12 kelurahan.

2. Keadaan Demografis

Banyaknya penduduk Kabupaten Banjarnegara (2010) diketahui sebesar 1.073.240 jiwa, terdiri dari 545.817 jiwa laki-laki dan 527.423 jiwa perempuan. Sedangkan sex ratio diketahui sebesar 103,49. Dengan kata lain dapat dinyatakan setiap 100 orang perempuan terdapat 103 orang laki-laki. Sedangkan jumlah rumah tangga sebanyak 266.596 rumah tangga (Kab. Banjarnegara Dalam Angka, 2010). Tingkat kepadatan penduduk, di Kabupaten Banjarnegara rata-rata sebesar 1.156 jiwa per Km², lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata Jawa Tengah sebesar 995 ribu jiwa per Km².

B. Gambaran Bidang

1. Bidang Kesehatan

a. Angka Kematian Kasar

Angka kematian kasar merupakan jumlah penduduk yang meninggal dunia dalam kurun waktu satu tahun. Angka kematian kasar ini digunakan untuk melihat derajat kesehatan penduduk khususnya dari usia harapan hidup. Jumlah penduduk di Kabupaten Banjarnegara yang meninggal dunia pada tahun 2009 sebanyak 2.818 jiwa, terdiri dari 1.465 jiwa laki-laki dan 1.353 jiwa perempuan. Dari angka kematian kasar ini terlihat bahwa angka harapan hidup penduduk laki-laki lebih rendah dibandingkan dengan perempuan.

b. Angka Kematian Ibu Hamil

Kematian ibu hamil di Kabupaten Banjarnegara masih terjadi, yaitu sebanyak 20 orang pada tahun 2009. Angka kematian ibu (AKI) mencerminkan resiko yang dihadapi ibu-ibu selama kehamilan dan melahirkan yang dipengaruhi oleh status gizi ibu, keadaan sosial ekonomi, keadaan kesehatan yang kurang baik menjelang kehamilan, kejadian berbagai komplikasi kesehatan termasuk pelayanan prenatal dan obstetric. Tingginya angka kematian ibu menunjukkan keadaan sosial ekonomi yang rendah dan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan prenatal dan obstetric yang rendah pula.

Kematian ibu biasanya terjadi karena tidak mempunyai akses ke pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas, terutama pelayanan kegawatdaruratan tepat waktu yang dilatarbelakangi oleh terlambat mengenal tanda bahaya dan mengambil keputusan, terlambat mencapai fasilitas kesehatan.

Disamping itu di Kabupaten Banjarnegara, jumlah ibu hamil yang menderita anemia atau kekurangan Fe masih cukup tinggi, yaitu sebanyak 4.785 orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa, tingkat resiko ibu hamil yang disebabkan kekurangan Fe di Kabupaten Banjarnegara masih tinggi.

c. Angka Kematian Bayi

Angka kematian balita adalah jumlah kematian balita (1 – 5 tahun) per 1.000 anak bayi. Pada tahun 2009 angka kematian bayi di Kabupaten Banjarnegara adalah 1,17% per 1.000 kelahiran, dengan jumlah bayi yang meninggal sebanyak 319 bayi, yang terdiri dari 158 bayi laki-laki dan 161 bayi perempuan. Kasus kematian bayi lahir mati biasanya disebabkan oleh pendarahan, penanganan persalinan, infeksi penyakit, berat bayi lahir rendah, dan perilaku ibu hamil yang tidak memeriksakan kehamilannya, perawatan kesehatan bayi baru lahir, istirahat cukup dan makan bergizi selama kehamilan, tidak merokok, tidak minum minuman keras.

Tingginya jumlah kematian bayi mengindikasikan rendahnya derajat kesehatan ibu hamil. Selain disebabkan kemiskinan yang membelit, rendahnya derajat kesehatan ibu mencerminkan posisi perempuan yang subordinasi di hadapan laki-laki. Dalam budaya patriarki, laki-laki sebagai kepala rumah tangga mempunyai kontrol yang kuat terhadap sumber daya dan menjadi pengambil keputusan keluarga. Kondisi ini bisa diperkuat oleh beban kerja domestik perempuan, apalagi dengan kondisi ekonomi yang kurang, sehingga harus berperan ganda membantu mencari nafkah.

d. Keluarga Berencana (KB)

Peserta KB masih didominasi oleh perempuan dan alat kontrasepsi yang tersedia juga lebih banyak diperuntukkan untuk perempuan. Alat kontrasepsi yang paling banyak digunakan adalah suntik (57,96%). Sedangkan untuk laki-laki yang ber KB bisa dikatakan kurang, karena diketahui hanya 1,01% yang menggunakan MOP, dan 1,65% yang menggunakan kondom.

Relasi gender yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan menyebabkan perempuan seringkali mengorbankan diri dalam berbagai hal, termasuk dalam keikutsertaan ber KB.

1. Bidang Pendidikan

1) Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Banjarnegara tahun 2009/2010 untuk SD/MI sebesar 106,77%, SLTP/MTs sebesar 97,32% dan SMA/MA sebesar 55,03%. Sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2009/2010 untuk SD/MI adalah sebesar 99,44%; SMP/MTs sebesar 88,61% dan SMA/MA sebesar 49,18%. Kondisi ini menunjukkan bahwa, motivasi penduduk Kabupaten Banjarnegara untuk mengikuti program pendidikan dasar 9 tahun sangat tinggi, namun untuk melanjutkan ke pendidikan menengah masih relatif rendah.

2) Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah untuk tingkat pendidikan SD/MI di Kabupaten Banjarnegara adalah sebesar 196 siswa, SMP/MTs sebesar 442 siswa, dan SMA/MA sebesar 260 siswa. Angka putus sekolah, baik di tingkat SD/MI, SMP/MTs maupun SMA/MA kebanyakan adalah siswa laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk laki-laki lebih banyak yang mengalami putus sekolah dari pada penduduk perempuan. Dari keseluruhan jumlah siswa yang putus sekolah yaitu sebanyak 898 anak, 64,92% = 583 adalah laki-laki. Hal ini dapat dikatakan bahwa lama sekolah anak perempuan dalam mengikuti pendidikan lebih baik daripada anak laki-laki.

3) Tingkat Pendidikan

Pada umumnya tingkat pendidikan penduduk dapat menggambarkan kualitas sumber daya manusia di wilayah tersebut. Tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten Banjarnegara tergolong masih rendah, sebagian besar penduduk berpendidikan SD/ sederajat, yaitu sebanyak 332.691 orang (39,58%), dimana penduduk perempuannya ada 166.024 jiwa (19,76%), dan

yang belum/tidak tamat SD perempuan jumlahnya lebih banyak daripada laki-laki, yaitu sebanyak 146.724 orang (17,46%). Penduduk yang berpendidikan Sarjana (S-1) hanya sebagian kecil saja, yaitu sebanyak 19.991 orang (2,39%), yang banyak dicapai oleh kaum perempuan, yaitu sebanyak 11.327 orang (1,35%).

4) **Angka melek huruf (*Literacy rate*)**

Angka melek huruf penduduk perempuan (62,88%) di Kabupaten Banjarnegara lebih banyak daripada penduduk laki-laki (37,12%). Kondisi ini menunjukkan bahwa, tingkat keaksaraan (dapat membaca dan menulis) penduduk perempuan lebih tinggi daripada penduduk laki-laki.

2. **Bidang Perekonomian**

a. **Ketenagakerjaan**

Jumlah pencari kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjarnegara, tahun 2009, adalah sebanyak 6.411 orang, yang terdiri dari 3.383 perempuan (52,77%) dan laki-laki sebanyak 3.028 orang (47,23%). Jumlah pencari kerja perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Hal ini menjadi indikator bahwa perempuan yang menganggur lebih banyak daripada laki.

1) **Jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Wanita (TKW)**

Penduduk Kabupaten Banjarnegara cukup banyak yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, yaitu sebanyak 708 orang. Dari 708 orang TKI yang bekerja di luar negeri, 672 orang (94,92%) adalah kaum perempuan, sedangkan laki-laki hanyalah sebanyak 36 orang (5,08%). Banyaknya tenaga kerja wanita (TKW) yang bekerja di luar negeri ini, dikarenakan besarnya beban hidup yang harus ditanggung, dan kesempatan kerja di negaranya sangat kecil, sedangkan kesempatan kerja di luar negeri masih sangat besar. Oleh karena itu TKW banyak yang mencari kesempatan kerja di luar negeri. Hal ini terjadi sebagai akibat dari adanya ketimpangan gender, sehingga perempuan harus menanggung beban kerja ganda, yaitu beban kerja dan tanggungan sosial kaum perempuan yang lebih berat daripada laki-laki, sebagai akibat dari sistem sosial yang bersifat patriarki, sehingga perempuan tidak mempunyai pilihan lain yang lebih baik. Adapun negara tujuan bekerja yang paling banyak adalah ke Singapura, yaitu 255 orang (36,02%), disusul kemudian Malaysia, yaitu 225 (31,78%) dan yang paling sedikit adalah ke negara Arab, yaitu 1 orang (0,14%).

2) **Jumlah Tenaga Kerja Perempuan di Sektor Pertanian**

Jumlah tenaga kerja di sektor pertanian di Kabupaten Banjarnegara masih didominasi oleh kaum laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa, akses kaum perempuan di sektor pertanian masih rendah, misalnya dibidang penyuluh pertanian, jumlah penyuluh pertanian yang ada di Kabupaten Banjarnegara ada 186 orang, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejumlah 77 orang dan Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 109 orang. Dari 77 orang tenaga penyuluh PNS, jumlah perempuan hanya sebanyak 11 orang (14,29%), sedangkan sebagai Tenaga Harian Lepas, perempuan sebanyak 40 orang (36,70%).

Demikian juga halnya dibidang usaha perikanan pembudidaya pembenihan dan pembesaran yang ada di kabupaten Banjarnegara didominasi oleh kaum laki-laki. Dari jumlah 18.209 orang yang melakukan usaha pembesaran dan pembenihan, 18.122 (99,52%) dilakukan oleh kaum laki-laki, sedangkan yang dilakukan oleh kaum perempuan hanya 87 (0,48%); Sedang di bidang pengolahan ikan, jumlah pengolahan ikan di kabupaten Banjarnegara ada sebanyak 57 pengolahan, yang tersebar di beberapa kecamatan. Pengolah ikan ini terbanyak ada di kecamatan Wanadadi (20 = 35,09%) dan Bawang (10 = 17,54%). Pengolah ikan ini kebanyakan dilakukan oleh kaum perempuan (50 orang = 87,72%), hal ini sesuai dengan anggapan bahwa perempuan adalah sebagai pelaku pekerjaan rumah tangga.

b. Perdagangan Dan Koperasi

Di kabupaten Banjarnegara bidang perdagangan dan koperasi juga masih didominasi oleh kaum laki-laki. Dibidang perdagangan, kepemilikan usaha dagang yang ada hampir berimbang antara laki-laki dan perempuan. Namun demikian kepengurusan dan keanggotaan koperasi yang ada masih didominasi oleh kaum laki. Dari jumlah anggota koperasi yang ada, yaitu sebanyak 120.637 orang, 70.637 orang adalah laki-laki, dan 719 orang laki-laki adalah sebagai pengurus, sedangkan kaum perempuan yang menjadi pengurus hanyalah sebanyak 532 orang.

4. Bidang Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu jumlah keluarga miskin dan IPM. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2009 adalah sebanyak 151.736 jiwa (16,02%) dari jumlah penduduk yang ada (946.900 jiwa). Dari jumlah penduduk miskin yang ada, ternyata jumlah perempuan miskin lebih besar daripada jumlah laki-laki miskin, yaitu 76.328 jiwa (50,30%) Sedangkan jumlah perempuan miskin paling banyak berada di Kecamatan Rakit (8.922 jiwa), dan paling sedikit berada di Kecamatan Wanayasa (780 jiwa). Sedangkan nilai IPM kabupaten Banjarnegara tahun 2009 adalah sebesar 69,63, artinya kabupaten Banjarnegara tingkat pembangunan manusianya termasuk dalam katagori cukup/sedang.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) mengukur keberhasilan pembangunan berwawasan gender di suatu wilayah, dengan nilai terendah 40 dan nilai tertinggi 80. Besarnya IPG kabupaten Banjarnegara tahun 2009 adalah sebesar 58,89 artinya kabupaten Banjarnegara dalam melakukan pembangunan berwawasan gender dapat dikatakan cukup, karena nilainya lebih besar dari 40. Kesenjangan gender yang terjadi dapat diketahui dari selisih antara nilai IPM dan IPG. Dari data tersebut berarti terdapat selisih yang cukup besar antara IPM dan IPG, yaitu sebesar 10,74, berarti di kabupaten Banjarnegara masih terdapat kesenjangan gender.

5. Bidang Kelembagaan

Dibidang kelembagaan kesenjangan gender masih terjadi. Hal ini ditunjukkan dari masih mendominasinya kaum laki-laki sebagai Anggota Badan Perwakilan Desa Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2009 yaitu sebanyak 3.056 orang laki-laki, sementara perempuan hanya sebanyak 163 orang, bahkan ada satu kecamatan yaitu, Kecamatan Pandanarum Anggota Badan Perwakilan Desa-nya adalah laki-laki semua, yaitu 96 orang (100 %) sedangkan perempuan tidak ada. Demikian halnya di DPRD, yang masih didominasi laki-laki yaitu sebanyak 42 orang, sementara perempuan hanya sebanyak 8 orang. Hal ini memperlihatkan bahwa keterwakilan perempuan di lembaga legislatif masih sangat rendah, jauh dari kondisi ideal untuk dapat mempengaruhi sebuah kebijakan. Rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen diantaranya adanya pandangan yang mensubordinasi perempuan.

6. Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)

Dibidang hukum dan HAM masih juga terjadi kesenjangan gender, karena personil penegak hukum lebih banyak didominasi oleh kaum laki-laki dari pada perempuan, yang ditunjukkan dari jumlah hakim di Kabupaten Banjarnegara sebanyak 7 orang terdiri dari 3 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Jumlah jaksa sebanyak 8 orang terdiri dari 6 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Jumlah pengacara sebanyak 30 orang terdiri dari 27 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Jumlah Satpol PP sebanyak 327 orang terdiri dari 282 orang laki-laki dan 45 orang perempuan.

Lain halnya dengan tindak kekerasan yang terjadi di kabupaten Banjarnegara, jumlah korban kekerasan sebanyak 27 orang terdiri dari 5 laki-laki dan 22 perempuan sebagai korban kekerasan, dan 10 diantaranya adalah sebagai korban seksual / perkosaan.

Strategi Pengarusutamaan Gender Untuk Mencapai Tujuan Pembangunan Millenium :

1. Bidang Kesehatan

- a. Menumbuhkan kesadaran kritis terhadap kesetaraan dan keadilan gender pada seluruh stakeholder bidang kesehatan dan KB.
- b. Meningkatkan akses dan cakupan pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir.
- c. Mendorong partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam menjamin penyediaan dan pemanfaatan pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir.
- d. Menyelenggarakan biaya kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat luas.

2. Bidang Pendidikan

- a. Menumbuhkan kesadaran kritis terhadap kesetaraan dan keadilan gender pada seluruh stakeholder bidang pendidikan.
- b. Menyelenggarakan Pendidikan Untuk Semua
- c. Meningkatkan kualitas pendidikan yang berperspektif gender.
- d. Menyelenggarakan Wajib Belajar 9 tahun untuk semua anak, baik laki-laki maupun perempuan
- e. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/ SDLB dan SMP, MI dan MTS, SMPLB, SMP Terbuka serta Pesantren Salafiyah
- f. Penyediaan Bantuan Dana Pendidikan (Dapen) Jenjang SD/ SDLB dan SMP, SMPLB, SMP Terbuka serta Pesantren Salafiyah
- g. Penyediaan Beasiswa bagi Siswa Keluarga Kurang Mampu
- h. Meningkatkan motivasi anak, baik laki-laki maupun perempuan untuk sekolah

3. Bidang Perekonomian

- a. Meningkatkan akses perempuan terhadap informasi pasar, komoditi dan pasar kerja
- b. Meningkatkan akses tenaga kerja perempuan dalam pasar tenaga kerja formal
- c. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam organisasi pekerja.
- d. Meningkatkan motivasi, ketrampilan, dan manajemen bagi pelaku usaha kecil perempuan

4. Bidang Kesejahteraan Sosial

- a. Meningkatkan masyarakat untuk memperoleh kesempatan yang sama di bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan
- b. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, guna mencapai kesejahteraan masyarakat secara merata.

5. Bidang Kelembagaan

- a. Menumbuhkan kesadaran kritis terhadap kesetaraan dan keadilan gender pada seluruh stakeholder bidang politik.
- b. Meningkatkan kualitas pendidikan politik yang berperspektif gender.
- c. Meningkatkan akses perempuan terhadap pelatihan jenjang karir yang akan mendorong makin menguatnya posisi perempuan dalam pengambilan keputusan.
- d. Meningkatkan pendidikan politik formal maupun non formal kepada perempuan.

6. Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)

- a. Pemantauan dan pendataan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, yang bisa menghasilkan data base kondisi terkini kasus kekerasan terhadap perempuan.
- b. Memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

- c. Meniadakan kebijakan yang diskriminatif
- d. Menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Penutup

Strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan di Kabupaten Banjarnegara, merupakan kegiatan yang bersifat strategis untuk mencapai tujuan pembangunan millenium. Melalui strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan, nampak bahwa, akses, kontrol, manfaat dan partisipasi perempuan dalam pembangunan di kabupaten Banjarnegara meningkat, yang dapat ditunjukkan dari meningkatnya nilai IPM, IPG dan IDG kabupaten Banjarnegara. Dengan meningkatkan akses, manfaat, kontrol dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, diharapkan akan dapat mencapai keadilan dan kesetaraan gender sesuai dengan tujuan pembangunan millenium tahun 2015.

Daftar Pustaka

Anonim, Rencana Strategis Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 – 2011, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, Banjarnegara, 2011.

Anonim, Banjarnegara Dalam Angka Tahun 2009, Bappeda dan BPS Kabupaten Banjarnegara, Banjarnegara, 2010.

Anonim, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tahun 2005 - 2009, Bappeda dan BPS Kabupaten Banjarnegara, Banjarnegara, 2010.

Anonim, Renstra Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2006 – 2017.

Anonim, Profil Pendidikan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010,

Anonim, Profil Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010,

UU No. 32 tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*, Penerbit Sekretariat Negara RI, Jakarta, 2004.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on Eliminations and Discriminations Against Woments/CEDAW), Sekretariat Negara RI, Jakarta, 1984.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Sekretariat Negara RI, Jakarta, 2004.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Sekretariat Negara RI, Jakarta, 2004.